



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3703-3712

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sekuritisasi Pangan Nasional Fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI

Heri Napitupulu

Universitas Nurtanio

Email: napitupuluheri7@gmail.com

Abstrak

Ketahanan Pangan Indonesia seperti diketahui sebagai Kedaulatan Pangan, menjadi bagian program kepemimpinan Bapak Joko Widodo, rencana Nawacita. Adapun program sekuritisasi pangan, pemerintah pusat dan daerah meminta fungsi OMSP TNI membantu pemerintah daerah sesuai dengan UU TNI No. 34 Tahun 2004 pada point 5 dan 9, yaitu TNI mengamankan obyek vital nasional dan membantu tugas pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas nasional. Pangan nasional sebagai obyek vital nasional memnuhi ketersediaan, akses, manfaat, dan stabil pangan. Menindaklanjuti konseptual hubungan sipil-militer, tulisan ini menganalisis peran Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI efektif mengoperasikan Sekuritisasi Pangan Nasional. Merefereksi studi kualitatif dari data wawancara, primer dan sekunder, observasi ini menjumpai ternyata fungsi OMSP TNI pada Ketahanan Pangan bermunculan pro dan kontra. Sikap pemerintah menggunakan fungsi OMSP TNI memberdayakan pangan dianggap akan kembalinya fungsi politik militer Indonesia sebagaimana halnya terjadi masa rezim Soeharto, sekalipun, militer diminta pemerintah daerah untuk membantu sektor pertanian khususnya di daerah konflik, contohnya di tanah Papua. Bantuan dari fungsi OMSP TNI diproyeksikan dapat mendampingi petani dari problem di lokasi pertanian dengan menjalankan fungsi teritorial di desa-desa. Sesungguhnya OMSP TNI adalah membantu peran pemerintah daerah untuk Ketahanan Pangan dengan dikerjakan berkesinambungan di NKRI; saat ada permasalahan di lokasi pertanian, TNI akan melaporkan masalah tersebut kepada instansi yang berwenang.

Kata Kunci : *Keamanan Pangan, OMSP TNI, Sekuritisasi*

Abstract

Indonesia's Food Security, as known as Food Sovereignty, is part of Mr. Joko Widodo's leadership program, Nawacita's plan. As for the food securitization program, the central and regional governments asked the TNI OMSP function to assist local governments in accordance with TNI Law No. 34 of 2004 at points 5 and 9, namely the TNI secures national vital objects and assists local governments in their duties to maintain national stability. National food as a national vital object has food availability, access, benefits, and stability. Following up on the conceptual of civil-military relations, this paper analyzes the role of Military Operations Other Than War (OMSP) TNI in effectively operating National Food Securitization. Referring to qualitative studies from interview, primary and secondary data, this observation found that the function of the TNI OMSP on Food Security has emerged pros and cons. The government's attitude of using the TNI's OMSP function to empower food is considered to be the return of Indonesia's military political function as happened during the Soeharto regime, even though the military was asked by local governments to help the agricultural sector, especially in conflict areas, for example in the land of Papua. Assistance from the OMSP TNI function is projected to be able to assist farmers from problems in agricultural locations by carrying out territorial functions in villages. Actually, the TNI OMSP is to help the role of local governments for Food Security by being carried out continuously in the Republic of Indonesia; when there is a problem at the agricultural location, the TNI will report the problem to the authorized agency.

Keywords : *Food Safety, OMSP TNI, Securitization*

PENDAHULUAN

Presiden Joko Widodo menyertakan OMSP TNI berada pada konsep kedaulatan pangan program Nawacita RPJM 2014-2019 dan Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2015-2045. Data *World Poverty Clock* (2019), total masyarakat miskin di NKRI naik 12.783.505 orang. Kemiskinan mengancam di pedesaan dan perkotaan (Niko, 2020). Dengan posisi Indonesia dalam Indeks Keamanan Pangan Global 2020 (*Global Food Security Index 2020*) (Marsi Edon, 2021) menurun dari posisi 62 ke 65 dari total 113 negara. NKRI peringkat ke-5 di Asean di atas Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos (Suryana, 2005). Tren menurun diakibatkan oleh: Pertama, penurunan produktivitas setiap tahun. Kedua, akses pangan mengalami penurunan. Ketiga, kapasitas masyarakat turun (CNN, 2020).

Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf (2019-2024) agenda di Kalimantan Tengah fungsi OMSP TNI diminta membantu wilayah pertanian, Kemenhan RI *leading sector* proyek Lumbung Pangan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat tugas di *food estate* seluas 178 hektar di Kalimantan Tengah (Irawan *et al*, 2017). Pertanyaannya, Apakah tentara dilatih untuk bercocok tanam? (Ikhlasiati, 2015). Komisi IV DPR Fraksi PKB Daniel

Johan mengatakan proyek Lumbung Pangan efektif dipimpin Kementerian Pertanian. Fraksi Demokrat S. Hasan mengatakan proyek Lumbung Pangan bukan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan (Law-justice.co, 2020). Prediksi ancaman dari Buzan (Alfajri *et al*, 2019) bahwa terdapat tiga jenis ancaman yang saat ini dihadapi dunia, yaitu: ancaman militer, iklim, dan kelangkaan pangan.

Sekuritisasi Pangan di Indonesia pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI untuk mencapai ketersediaan, akses, manfaat dan stabilitas pangan. Wijayanti (2022) menyoroti krisis politik Myanmar pada 1999 yang membawa pada ancaman pangan dan kekurangan gizi anak-anak. Sekuritisasi pangan yang tidak normal berpengaruh terhadap kekuatan tempur militer di negara manapun (Makhroja, 2020). Penelitian fungsi OMSP TNI konsepnya mendukung Keamanan Pangan Nasional sebagai objek vital nasional harus aman membantu tugas pemerintahan daerah dengan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) (Zuhra, 2019) (Lilis, 2015). *Involvement* atau keterlibatan TNI pada domain sipil tidak dapat diukur pada kepentingan sesaat, pada hubungan antara individu, masalah atau objek (Jufrizen *et al*, 2020). Proses analisis data dari wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya (Herdiansyah, 2015). Penelitian ini bersumber dari data yang sudah ada agar mendukung informasi primer dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI dalam konteks sekuritisasi pangan nasional. Penelitian ini mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari berbagai sumber yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan berbagai informan kunci, termasuk pejabat pemerintah, personel TNI, dan petani di daerah yang terkena dampak kebijakan OMSP TNI. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif yang beragam mengenai efektivitas dan kontroversi seputar keterlibatan TNI dalam ketahanan pangan.

Penelitian ini meninjau variabel-variabel seperti peran TNI dalam menjaga stabilitas nasional, pengaruh OMSP TNI pada sektor pertanian di daerah konflik, dan dampak sekuritisasi pangan terhadap kedaulatan pangan Indonesia. Selain itu, studi ini mengeksplorasi pro dan kontra terkait penggunaan TNI dalam program ketahanan pangan, termasuk kekhawatiran tentang kembalinya fungsi politik militer yang pernah

dominan pada masa rezim Soeharto. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola temuan dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana OMSP TNI dapat mendukung atau menghambat ketahanan pangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekuritisasi Pangan di Indonesia

Pangan mutlak Hak Asasi Manusia dari *Universal Declaration of Human Right* (1948) dan *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Right* (1966). PBB mendahulukan kebijakan pangan bukti terselenggaranya *World Food Summit* tahun 1996 di Roma yang diikuti 186 negara (*European Community*). Forum ini menyepakati *Rome Declaration World Food Security and World Food Summit 1996*. Pada forum tersebut ada hadir 112 kepala negara dan 70 pejabat tinggi menandatangani deklarasi dan konsekuensi yang harus meneruskan keputusan deklarasi. Menurut Hampson *et al* (1998) pada "*Security: A New Framework for Analysis*", Lima konsep Sekuritisasi, sebagai berikut, Pertama, Isu Publik tidak dipolitisasi. Kedua, Politisasi negara. Ketiga, Ancaman Eksistensial, yakni isu ancaman nyata (*existential threat*) kepada negara, rakyat atau masyarakat. Keempat, Objek Referensi eksistensi ancaman melegitimasi bertahan atas ancaman. Kelima, Pendengar (*audience*), mengevaluasi pihak yang perlu diyakinkan. Keenam, Aktor Fungsional, yaitu aktor-aktor yang mengeluarkan kebijakan.

Fungsi OMSP TNI dari Keamanan Pangan mempunyai isu berbeda-beda. *Referent object* (dianggap ancaman) krisis pangan alasan utama Sekuritisasi, *Speech act* pidato resmi Presiden RI (Susilo Bambang Yudhoyono) saat panen raya, konferensi Dewan Ketahanan Pangan dan pemberian penghargaan keamanan pangan. *Securitizing actor* fungsi OMSP TNI menjadi tiga kriteria yaitu: *Lead actor* (aktor utama Sekuritisasi), *Veto actor* (aktor memperlemah Sekuritisasi), dan *Veto coalition* (aktor negara memperkuat atau memperlemah isu). Sekuritisasi Pangan Nasional fungsi OMSP TNI dalam Keamanan Pangan dinyatakan sebagai *lead actor* birokrat dan swasta menangani krisis pangan dan keamanan nasional.

Teori Sekuritisasi memisahkan Politik dan Keamanan atau Politisasi dan Sekuritisasi. Membetulkan melanggar aturan politik 'normal' (Howell, 2020), *Wæver* menarik perhatian (diduga diinginkan) desekuritisasi: de-eskalasi kembali ke 'politik normal' (Howell, 2020). Keamanan yang terbaik dipahami Burhanuddin (2017) '*survival-plus,*' '*the "plus"* kebebasan dari ancaman kehidupan dan beberapa kehidupan pilihan'. Anggapan ini,

keamanan diketahui sebagai komoditas yang menjadi tujuan (pelaku harus memiliki hal-hal tertentu seperti properti, uang, senjata, tentara, dan sebagainya).

Sekuritisasi Pangan Nasional fungsi OMSP TNI pada Keamanan Pangan menjamin proses pemograman dan penetapan kebijakan Pangan Indonesia pada kondisi sosial dan politik pemerintah merupakan aktor utama sekuritisasi. Pada kepemimpinan SBY, Sekuritisasi Pangan ditentukan kebijakan *Food Estate* (FE) kebijakan pangan menasional termasuk jadwal pada program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu, adalah: Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan kebijakan umum Dewan Ketahanan Pangan 2005-2009 dan 2010-2014. Diantaranya: Pembebasan lahan, pemerintah proaktif menguasai lahan punya masyarakat dan dikembalikan kepada badan usaha ketika ada perlawanan dari publik setempat dan adanya advokasi pihak NGO skala nasional ataupun internasional.

Instruksi Presiden dan Peraturan Pemerintah tidak membutuhkan persetujuan DPR, tindaklanjut Inpres, PP dan UU TNI fungsi OMSP TNI pada Keamanan Pangan direalisasikan dengan sangat tepat untuk menanggulangi ancaman krisis pangan yang bersifat intersubjektif dan dengan objektif diperlukan karena pangan kebutuhan primer. Ancaman pangan diasumsikan menjadi persoalan krisis secara subjektif, maka aktor menandai isu pangan menjadi isu keamanan. Pemerintah menerbitkan Kebijakan Pangan Indonesia melalui: Kebijakan Umum Dewan Ketahanan Pangan 2005-2009, PP No.18/2010 tentang Pertanian Tanaman Pangan Berskala Luas, Kebijakan Umum Dewan Ketahanan Pangan 2010-2014, UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No.25/ 2007 tentang Penanaman Modal, UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 18/2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, PP 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Pandangan negatif kepada kebijakan pemerintah dirasakan cukup tinggi, dengan kekhawatiran rakyat Papua jika kekayaan potensi alamnya dieksploitasi dengan berlebihan mengakibatkan populasidan lingkungan tidak menerima Kebijakan Pangan Pemerintah dan fungsi OMSP TNI. Kekayaan dan potensi alam Papua sudah dieksploitasi cara yang pakai melalui pendekatan *Up-Bottom* (atas-bawah), konsep kebijakan pangan yang ternyata diselenggarakan dari pemerintah dan kepentingan swasta, tidak ada keikutsertaan rakyat sipil atau yang berkepentingan. Polesi Sekuritisasi fungsi OMSP TNI pada Keamanan Pangan, jika terjadi kesalahan dapat mengakibatkan perubahan budaya setempat, contohnya: Tradisi panen raya dan cara gotong royong menghilang di tengah masyarakat. Pangan Indonesia berpindah dari *peasant-based and family-based*

agriculture (pertanian bertumpu dari petani dan keluarga) menjadi *corporate-based food and agriculture production* (hasil pertanian bertumpu pada perusahaan).

OMSP TNI Keamanan Pangan.

Memahami Keamanan Negara di manapun mengfungsikan operasi militer dalam menjaga kepentingan nasional dengan anggapan dan penilaian pentingnya Keamanan Pangan (*food security*). Fungsi OMSP TNI untuk mendampingi dan pengamanan sudah melakukan tindakan membuktikan Keamanan Pangan Nasional. Keputusan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhut-V/2004 tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Keputusan Bersama Tiga Menko No. 09/Kep/Menko/Kesra/III/2003, Kep.16/M. Ekon/03/2003, Kep.08/Menko/Polkam/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional, biaya pada tingkat Kodim. Memelihara lingkungan, fungsi OMSP TNI dengan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), dilakukan pada semua Kodam diawali Tahun 2003 dikembalikan pada Pemerintah ditahun 2008.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Menteri Pertanian menggaet TNI sebagai upaya dan fungsi khusus mewujudkan Swasembada Pangan untuk Tahun 2017, untuk itulah fungsi OMSP TNI melakukan membantu penyediaan dan distribusi pangan pada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Operasi yang dilaksanakan fungsi OMSP TNI pada Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), terselenggara GNRHL Tahun 2004 hingga selesai Tahun 2006, fungsi OMSP TNI sudah berhasil melakukan GNRHL mencapai 860.000 hektar di wilayah NKRI. Fungsi OMSP TNI yaitu manunggal dengan masyarakat melaksanakan program Swasembada Pangan dan menolong petani menyemprotkan hama padi. Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) menginginkan, petani menjadi rajin dan senang menggunakan area untuk dapat menghindari kurangnya stok pangan di Indonesia.

Fungsi OMSP TNI dapat mewujudkan itikad baik pemerintah mencapai Swasembada Pangan sekalipun timbul pro dan kontra. Penugasan Babinsa disebabkan Kementerian Pertanian minimnya tenaga pendamping komunitas tani hingga 70.000 orang di Indonesia. Fungsi OMSP TNI pada Keamanan Pangan melakukan perannya menjadi motivator, fasilitator, dinamisator, inovator untuk kelompok tani di lokasi, ditinjau karena mempunyai potensi menggerakkan menuju berhasinya Keamanan Pangan, diharapkan desa-desa memiliki Lumbung Pangan. Hingga saat ini OMSP TNI pada Keamanan Pangan telah melakukannya berkesinambungan di wilayah NKRI, sekalipun ada persoalan kesiapan pupuk, benih, irigasi atau kebutuhan lain yang belum memenuhi kebutuhan petani, TNI

melakukan pencacatan dan menyampaikan persoalan kepada yang berkepentingan dan mempunyai otoritas.

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI.

OMSP TNI sesuai dengan UU TNI No. 34 dilaksanakan bukan dalam kondisi perang dengan negara lain, tetapi membantu pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undangan. Tertera pada Nota Kesepahaman antara Kemenhan RI dan Panglima TNI nomor 10/MOU/HK.220/M/4/2020 dan NK/10/IV/TNI tentang Program Pembangunan Pertanian tanggal 1 April 2020 di Jakarta. Fungsi OMSP TNI menuju Keamanan Pangan sebagai Keamanan Nasional bersama Kementerian Pertanian. Kegiatan yang sangat serius dilakukan OMSP TNI pada pembekalan sektor pertanian bersama-sama Dinas Pertanian. Adapun pembentukan Satuan Produksi Pangan di semua kesatuan-kesatuan TNI mengikuti keinginan memaksimalkan fungsi OMSP TNI.

Sekuritisasi Pangan Nasional fungsi OMSP TNI mampu memelihara stabilitas dari sisi Ketersediaan, Akses, Manfaat, dan Stabilitas Pangan Nasional dan mampu menjaga kebutuhannya. Hadirnya keberadaan fungsi OMSP TNI pada Keamanan Pangan untuk: Cetak sawah, mendirikan bendungan, Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Program emas biru (potensi sumber daya laut) dan emas hijau (potensi sumber daya bumi), sekaligus melakukan pengawalan dan pendampingan. Instansi TNI telah melakukan fungsinya pada area pertanian, yakni: Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru, petani-petani khusus komoditas sayuran dibina Lanud Roesmin Noerjadin yang sudah mampu mengekspor hasil panennya pada pasar lokal dan diminta ke Singapura. Satuan Radar 214 Tegal, mempunyai tambak udang dengan hasil panennya sudah didistribusikan di pasar lokal maupun ekspor. Dinas Potensi Maritim TNI AL melakukan hal yang sama bersama rakyat memberikan penyuluhan, praktik (tanam padi, palawija, sayuran, budidaya ikan darat dan laut), pendistribusian termasuk pemasarannya.

Pangkalan Udara TNI AU Suryadarma Kalijati Subang memberdayakan pakan ikan dan ayam serta memberdayakan lalat cocok untuk pakan bergizi ternak. Proses pemberdayaan sampah kering dan basah akan diproses menjadi pakan hewan, memanfaatkan dedak padi akan dibuat pupuk organik. Koramil Bandung Barat ingin melaksanakan sisi ketersediaan, akses, manfaat dan stabilitas Pangan Daerah berharap diwujudkan secara maksimal. Kementan RI, Kemenhan RI, Mabes TNI dan Angkatan serta satuan TNI telah perjanjian kerja sama bersama Dinas Pertanian Daerah dan perusahaan, diantaranya ada satuan TNI sudah mempunyai kelompok tani yang dibina. Penyuluhan khusus Keamanan Pangan, harus dilakukannya sesuai dengan Tupoksi fungsi OMSP TNI

melakukakan usaha-usaha menuju kesejahteraan rakyat.

OMSP TNI Pada Keamanan Pangan Nasional.

Fungsi OMSP TNI ketika menghadapi Keamanan Pangan menerapkan ketentuan FAO tolak ukur Keamanan Pangan Nasional. Konsepnya (FAO, 2008), (Devereux, 2020), yaitu:

a) *Availability* (Ketersediaan).

Prakteknya fungsi OMSP TNI dengan Sekuritisasi Keamanan Pangan Nasional mewujudkan atas ketersediaan pasokan pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jumlah yang tepat, aman, dan penuh gizi dalam suatu negara terpenuhi, baik dari hasil produksi sendiri, impor, cadangan pangan ataupun untuk bantuan pangan. Fungsi OMSP TNI dengan Sekuritisasi Keamanan Pangan Nasional berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pertukaran.

b) *Access* (Akses).

Prateknya fungsi OMSP TNI dengan Sekuritisasi Keamanan Pangan Nasional terpenuhinya pada *Akses* fisik dan kondisi ekonomi (*Economic and physical Access to food*) dengan pangan sangat tercukupi secara nasional berarti keberadaannya yang mampu menjamin kebutuhan rumah tangga. Termasuk lokasi atau keberadaan posisi pangan dapat mempengaruhi akses kepada semua bahan pangan dan semua jenis akses yang digunakan pada lokasi dan rumah tangga tersebut.

c) *Utility* (Manfaat).

Prateknya fungsi OMSP TNI dengan Sekuritisasi Keamanan Pangan Nasional terpenuhi dari sisi asupan nutrisi pada Pangan Nasional dan penggunaan Pangan (*Food Utilization*) terpenuhi kebutuhan dengan dipahaminya kenyataan kecukupan energi dan gizinya. Adapun Pemanfaatan pangan dilakukan dengan cara melakukan penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di rumah tangga, kelompok dan perorangan, karenanya edukasi penting mengenai nutrisi dan penyiapan bahan pangan dapat dan mampu mempengaruhi kualitas pemanfaatan pangan.

d) *Stability* (Stabilitas).

Prateknya fungsi OMSP TNI dengan Sekuritisasi Keamanan Pangan Nasional tercapai dari sisi stabilitas pangan yang difokuskan pada kebutuhan konsumsi pangan Nasional yang berkelanjutan (*sustainability*) sepanjang waktu sekalipun pada kondisi cuaca, politik, dan ekonomi, keamanan dan pertahanan negara. Stabilitas (*stability*) soal kerawanan pangan kronis (*chronic food insecurity*) dan sisi kerawanan pangan sementara (*transitory food insecurity*). Kerawanan pangan yang diakibatkan tidak tersedianya kebutuhan pangan

setiap saat, adapun kerawanan pangan disebabkan kekeringan, banjir, bencana, dan konflik sosial.

SIMPULAN

Sekuritisasi Pangan Nasional fungsi OMSP TNI dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Fungsi OMSP TNI dari Keamanan Pangan memenuhi ketersediaan, akses, manfaat, dan stabil pangan menuju kesejahteraan termasuk menyediakan kesiapan tempur pasukan untuk situasi damai dan perang. Ketersediaan pangan sanggup menyiapkan pada krisis pangan dan tanpa ketergantungan impor pangan, tersedia stok pangan setiap saat. Keberadaan lahan pangan sedikit bahkan terjadi *gap* berbanding pada lokasi subur yang tersedia di Pulau Jawa dengan kurang subur daerah Papua dan Kalimantan.
2. OMSP TNI menuju Keamanan Pangan Nasional, TNI digunakan melengkapi dibentuknya Badan Cadangan Lembaga Strategis (BCLS) khusus pangan menggunakan komponen cadangan dan TNI aktif. Keberadaan BCLS terampil bertanam mewujudkan ketersediaan Pangan Nasional.
3. Terselenggaranya Keamanan Pangan menjadi bentuk strategi Ketahanan Nasional, hanya saja ada hambatan birokrasi dari pemerintah tidak memberikan Peraturan Presiden, demikianpun yang dialami sawah *Estate* di Kalimantan tanpa aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfajri, A., Setiawan, A., & Wahyudi, H. (2019). Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia. *Jurnal Global & Strategis*, 13(1), 103.
- Analysis. *International Journal*, 53(4), 798. <https://doi.org/10.2307/40203739>
- Burhanuddin, A. (2017). *Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*. Unhas.
- CNN Indonesia. (2020, July 13). Kemenhan Pimpin Lumbung Pangan: Memori Orba dan Isu
- Hampson, F. O., Buzan, B., Waever, O., & Wilde, J. de. (1998). *Security: A New Framework*
- Herdiansyah, H. (2015). Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrument
- Howell, M. J., & Howell, M. J. (2020). Financial Crises and Safe Assets. *Capital Wars: The Rise of Global Liquidity*, 233-247.
- Ikhlasniati. (2015). Peran TNI AD dalam Program Ketahanan Pangan. *Blog Mahasiswa Ilmiah Manajemen*, 10(2), 249. <https://doi.org/10.22441/mix.2020.v10i2.008>
- Irawan, B., Hidayat, M. N., & Risal, M. (2017). *Investasi di Kalimantan Timur*.
- Jufrizen, J., Daulay, R., Sari, M., & Nasution, M. I. (2020). Model Empiris Peningkatan

- Kepuasan Dan Niat Beli Konsumen Dalam Pemilihan Online Shop Instagram. *Mix Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 249.
- Law-justice.co. (2020, October 6). Analisis Hukum Bisnis Kemenhan Keruk Dana
- Lilis Khalisotussurur. (2015). TNI Masuk Desa Urusi Pertanian, Tepatkah? GRESNES.COM. Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 31(1),
- Makhroja, M. N. (2020). Sekuritisasi Isu Migrasi Di Polandia: Keamanan Nasional Atau Manajemen Bencana.
- Marsi Edon. (2021). Keterlibatan Komponen Cadangan Militer dalam Proyek Food Estate
- Niko, N., & Atem, A. (2020). Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah OMSP. Penggalan Data Kualitatif. In *Metodologi Penelitian. Penggalan Data Kualitatif. In Metodologi Penelitian. Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. Jurnal Surya Masyarakat*,
- Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Kepentingan Nasional Dalam Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 2(2), 70-95.
- Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik